

**Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pembinaan Organisasi
Kemasyarakatan Adat ” (Studi Kasus Di Badan Kesbangpolda)**

Novriyanto Wartabone Mandak¹

Ronny Gosal²

Donald K. Monintja³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Adat ” (Studi Kasus Di Badan Kesbangpolda). Pembinaan ormas yang seyogyanya di dilaksanakan oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah dan pembangunan demokrasi antara lain, kesatu, adanya kesepakatan terhadap nilai nilai dasar, ideologi dan cita cita untuk bersatu menjadi suatu bangsa (Integrasi normatif). kedua, adanya rasa ketergantungan fungsional dan manfaat fungsional yang konkrit dari tiap ormas dengan terintegrasi dalam satu kesatuan (Integrasi fungsional), ketiga, adanya kekuatan dalam menjaga komitmen tiap ormas untuk menciptakan kestabilan dan keteraturan (Integrasi koersif).. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan Pihak kesbangpolda sendiri dalam proses pembinaan organisasi kemasyarakatan selalu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan juga generasi muda. Hal ini dikarenakan kesbangpolda dalam pelaksanaan sosialisasi membutuhkan bantuan dari semua elemen masyarakat yang ada, karena pembinaan organisasi kemasyarakatan ini perlu adanya peran aktif dari masyarakat yang ada, agar supaya tujuan dari pembinaan organisasi kemasyarakatan ini dapat berjalan dengan baik

Kata Kunci : Kinerja, Pemerintah Provinsi, Pembinaan, Ormas

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Regulasi-regulasi tentang Keormasan, di pertanyakan eksistensinya seiring dengan keterbukaan sebagai bagian dari upaya menerapkan good corporate social and community oleh pelaku ormas, pada saat yang sama, ada keinginan untuk mengimplementasikan Good Governance atau tata kelola pemerintahan. Keterkaitan antara pemerintah selaku regulator yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat maupun dalam kapasitasnya memberikan pembinaan, maka undang undang keormasan itu masih cukup relevan untuk menjadi acuan.

Paling tidak, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan stressing atau sebagai entry point bagi kelangsungan pembinaan organisasi masyarakat. Pertama, bahwa untuk lebih meningkatkan peran ormas untuk turut mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional maupun ditingkat daerah. Kedua, adanya hubungan yang cukup signifikan antara ormas dengan pemerintah dalam membangun struktur sosial, budaya dan hubungan antar masyarakat dalam suatu wilayah. Ketiga, bahwa peran serta masyarakat dalam membangun tata kehidupan yang demokratis sudah semakin terbuka lebar, dengan adanya kesempatan yang luas untuk menyampaikan pendapat, kebebasan membentuk kelompok masyarakat yang peduli terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembentukan masyarakat sipil yang mempunyai peran yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan adanya perubahan yang cukup strategi dalam beberapa tahun ini, pertumbuhan Organisasi Kemasyarakatan semakin banyak. Ini menunjukkan bahwa elemen masyarakat semakin berkesempatan untuk membuat kelompok, organisasi atau lembaga yang berorientasi pada penghimpunan potensi yang ada untuk menjadi sebuah kekuatan yang riil.

Namun tentu saja, dengan karakter, corak dan tujuan yang berbeda itu dalam pembentukannya akan memperkaya khasanah pemikiran untuk bersama sama membangun bangsa dan negara.

Pembinaan ormas yang seyogyanya di laksanakan oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah dan pembangunan demokrasi antara lain, kesatu, adanya kesepakatan terhadap nilai nilai dasar, ideologi dan cita cita untuk bersatu menjadi suatu bangsa (Integrasi normatif). kedua, adanya rasa ketergantungan fungsional dan manfaat fungsional yang konkrit dari tiap ormas dengan terintegrasi dalam satu kesatuan (Integrasi fungsional), ketiga, adanya kekuatan dalam menjaga komitmen tiap ormas untuk menciptakan kestabilan dan keteraturan (Integrasi koersif).

Di Sulawesi Utara sendiri, jumlah organisasi kemasyarakatan sangat banyak jumlahnya, menyentuh angka ratusan, adapun latar belakang Organisasi kemasyarakatan di Sulawesi Utara sangat beragam, ada yang memiliki latar belakang Adat, meliputi adat Minahasa yang terbagi dalam berbagai sub etnis, adat Nusa

utara dan juga adat Bolaangmongondow.

Ada juga organisasi kemasyarakatan yang berlatar belakang keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Muhamadiyah, dan Juga GMIM. Ada pula organisasi kemasyarakatan pemuda yang mewadahi aktifitas kepemudaan di antaranya Komite Nasional Pemuda Indonesia, Pemuda Pancasila, Purna Parkibraka Indonesia dan masih banyak lagi Organisasi kemasyarakatan dengan berbagai macam latar belakang.

Dengan kuantitas yang sangat banyak ini semestinya organisasi kemasyarakatan di Sulawesi Utara perlu menjadi perhatian khusus serta pembinaan dari pemerintah daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah (KESBANGPOLDA) Provinsi Sulawesi Utara selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara teknis menangani pembinaan Organisasi kemasyarakatan, Pembinaan organisasi kemasyarakatan di Sulawesi Utara menjadi hal urgent mengingat jika kita berkaca pada beberapa peristiwa yang berpotensi menjadi konflik sosial di daerah Sulawesi Utara melibatkan beberapa organisasi kemasyarakatan yang seharusnya Organisasi kemasyarakatan memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, peneliti juga memperoleh informasi bahwa ada 104 organisasi masyarakat yang belum terdaftar secara resmi di pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Badan kesatuan bangsa dan Politik, beberapa hal ini menjadi salah satu permasalahan yang ada di provinsi Sulawesi Utara khususnya dalam

bidang Keamanan dan ketertiban sosial.

Tinjauan Pustaka **Konsep Kinerja**

Pengertian Kinerja Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut (Bastian, 2011:329).

Wibowo mengatakan bahwa: "Pengertian performance sering diartikan sebagai kinerja, hasil kerja/prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi" (Wibowo, 2017:7).

Pengertian lain menurut Maluyu S.P. Hasibuan bahwa: "Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu" (Hasibuan, 2011:34). Pengertian kinerja menurut Hasibuan di atas bahwa untuk mencapai sebuah kinerja, seorang aparatur harus memiliki kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu agar dapat berjalan seperti yang diharapkan. Pendapat lain tentang kinerja, seperti yang dikemukakan oleh

Widodo (2016:78) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang di harapkan. Dari definisi diatas maka dalam melakukan dan menyempurnakan suatu kegiatan harus didasari dengan rasa tanggung jawab agar tercapai hasil seperti yang diharapkan.

Adanya hasil kerja yang dicapai oleh aparatur dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Organisasi pemerintahan menggunakan alat untuk mengukur suatu kinerja birokrasi publik, indikator yang digunakan menurut baban Sobandi dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah sebagai berikut (Sobandi dkk, 2016 : 179-181) :

1. Keluaran (Output)
2. Hasil
3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian
4. Informasi Penjelas Pertama,

Pengertian Organsiasi

Istilah organisasi berasal dari bahasa Inggris, *organization*. Syamsi (1994:13) menyatakan bahwa organisasi dapat diartikan dua macam, yaitu:

- (1) Dalam arti statis, organisasi sebagai wadah kerja sama sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu;
- (2) Dalam arti dinamis, organisasi sebagai suatu sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Robbins dalam Ndraha (2011:235), organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan

sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Organisasi menurut Handyaningrat (1985:42) adalah wadah (wahana) kegiatan daripada orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan tersebut, setiap orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya.

Sedangkan menurut Hardjito (2007:5), organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang memungkinkan anggota mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai melalui tindakan individu secara terpisah.

Pengertian Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2013, ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Organisasi masyarakat atau yang biasa disebut dengan ormas

merupakan organisasi sosial. Organisasi sosial itu memiliki latar belakang dan atau cirri tertentu sebagai identitasnya, misalnya suku, etnis, agama atau identitas lainnya. Organisasi tersebut juga dibangun atas tujuan-tujuan tertentu yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kepentingan-kepentingan organisasi. Dengan adanya identitas dan kepentingan ini, anggota-anggota di dalamnya kemudian menginternalisasi dan menjalankan nilai-nilai yang berlaku bagi kelompoknya, sehingga mereka atau orang-orang di luar kelompok akan memahami anggota-anggota tersebut sebagai sebuah organisasi sosial. (Gatot Eddy Pramono 2015:5)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus Penelitian ini adalah mencari tahu bagaimana Kinerja badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan Pembinaan Organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara, Organisasi pemerintahan menggunakan alat untuk mengukur suatu kinerja birokrasi publik, indikator yang digunakan menurut baban Sobandi dalam bukunya yang berjudul Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah sebagai berikut (Sobandi dkk, 2006 : 179-181) :

1. Keluaran (Output)
 2. Hasil
 3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian
- Adapun informan yang di pilih oleh Peneliti adalah :
1. Kepala badan KESBANGPOLDA SULUT (1 orang)
 2. Kepala Bidang Politik dalam Negeri (1 Orang)
 3. Pengurus Ormas Adat Brigade Manguni Indonesia (1 Orang)

4. Pengurus Ormas Adat Laskar manguni Indoensia (1 Orang)
5. Pengurus Ormas Adat Loyot Maesaan (1 Orang)

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan tentang Kinerja Pemerintah Provinsi dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan adat di Sulawesi Utara khususnya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan di bahas menggunakan teori (Sobandi dkk, 2006 : 179-181) :

1. Keluaran (Output).

Pada indicator ini peneliti akan melihat hasil yang di capai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan adat. Hasil yang di capai oleh Badan Kesbangpolda Sulawesi Utara sendiri dapat dilihat dari upaya-upaya dari badan kesbangpolda sendiri pada pembinaan organisasi kemasyarakatan adat yang ada, dan tentunya upaya-upaya tersebut membuahkan hasil yang baik pada organisasi kemasyarakatan yang ada. Yang dimana organisasi kemasyarakatan selalu diberikan bimbingan oleh badan kesatuan bangsa dan politik dalam menjalankan organisasinya khususnya di tengah masyarakat agar lebih bermanfaat. Proses Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan tentunya diharapkan agar supaya organisasi kemasyarakatan ini menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembinaan masyarakat yang ada. Proses pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang di lakukan oleh badan kesbangpolda sendiri telah berjalan dengan baik, namun setelah wabah covid-19 terdampak di daerah

kita, pihak kesbangpolda sendiri, mengalami masalah anggaran karena anggaran yang seharusnya di pakai untuk melaksanakan sosialisasi di geser untuk penanganan covid-19, hal ini tentunya berdampak pada program-program dari kesbangpolda yang seharusnya melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang ada.

Pihak kesbangpolda sendiri dalam proses pembinaan organisasi kemasyarakatan selalu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan juga generasi muda. Hal ini dikarenakan kesbangpolda dalam pelaksanaan sosialisasi membutuhkan bantuan dari semua elemen masyarakat yang ada, karena pembinaan organisasi kemasyarakatan ini perlu adanya peran aktif dari masyarakat yang ada, agar supaya tujuan dari pembinaan organisasi kemasyarakatan ini dapat berjalan dengan baik, karena harapan dari kesbangpolda sendiri ini dapat menjadi acuan untuk masyarakat yang ada terlebih khusus pada organisasi kemasyarakatan yang ada. Dalam proses pembinaan organisasi kemasyarakatan, ternyata LSM selalu berperan aktif dan selalu ambil bagian dalam proses sosialisasi wawasan kebangsaan ini. Pihak kesbangpolda sendiri juga mengharapkan untuk setiap proses sosialisasi wawasan kebangsaan ini, untuk semua elemen masyarakat dapat berperan aktif dan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan yang ada.

Proses Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Utara dalam mensosialisasikan tentunya harus ada perencanaan dan persiapan yang baik dan matang, karena mengingat bahwa wawasan kebangsaan ini merupakan suatu cara pandang yang harus melekat di setiap kehidupan

masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan ini juga pihak kesbangpol sendiri memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, hal ini dengan tujuan agar penerapan wawasan kebangsaan ini bisa menjadi acuan dan pemikiran masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka sebagai warga negara yang baik dan benar.

Dalam hal ini juga proses pelaksanaan sosialisasi ini membutuhkan dorongan dan kerja sama dari masyarakat, karena walaupun dari pihak kesbangpol sendiri sudah melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan ini dengan baik, namun dari masyarakat sendiri yang tidak menerapkan nilai-nilai dari wawasan kebangsaan ini, maka tujuan dari pelaksanaan wawasan kebangsaan ini tidak bisa terlaksana dan tidak bisa diterapkan pada kehidupan masyarakat yang ada.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan ini juga membutuhkan anggaran untuk menunjang program ini, ketika wabah covid-19 melanda Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan otomatis anggaran untuk pelaksanaan ini berkurang, dan tentunya ada beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil yang di capai oleh Badan Kesbangpolda Sulawesi Utara sendiri dapat dilihat dari upaya-upaya dari badan kesbangpolda sendiri pada pembinaan organisasi kemasyarakatan adat yang ada, dan tentunya upaya-upaya tersebut membuahkan hasil yang baik pada organisasi kemasyarakatan yang ada.

Yang dimana organisasi kemasyarakatan selalu diberikan bimbingan oleh badan kesatuan bangsa dan politik dalam menjalankan organisasinya khususnya di tengah masyarakat agar lebih bermanfaat. Proses Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan tentunya diharapkan agar supaya organisasi kemasyarakatan ini menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembinaan masyarakat yang ada. Proses pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh badan kesbangpolda sendiri telah berjalan dengan baik, namun setelah wabah covid-19 terdampak di daerah kita, pihak kesbangpolda sendiri, mengalami masalah anggaran karena anggaran yang seharusnya di pakai untuk melaksanakan sosialisasi di geser untuk penanganan covid-19, hal ini tentunya berdampak pada program-program dari kesbangpolda yang seharusnya melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang ada.

Pihak kesbangpolda sendiri dalam proses pembinaan organisasi kemasyarakatan selalu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan juga generasi muda. Hal ini dikarenakan kesbangpolda dalam pelaksanaan sosialisasi membutuhkan bantuan dari semua elemen masyarakat yang ada, karena pembinaan organisasi kemasyarakatan ini perlu adanya peran aktif dari masyarakat yang ada, agar supaya tujuan dari pembinaan organisasi kemasyarakatan ini dapat berjalan dengan baik, karena harapan dari kesbangpolda sendiri ini dapat menjadi acuan untuk masyarakat yang ada terlebih khusus pada organisasi kemasyarakatan yang ada.

2. Hasil.

Hasil dari pembinaan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Sulawesi Utara tentunya dapat dilihat dari aktifnya organisasi masyarakat yang dapat mengedukasi pada masyarakat yang ada, dalam proses membina masyarakat dan juga tujuan dari organisasi masyarakat yang ada. Hasil dari pembinaan organisasi kemasyarakatan juga bisa membawah masyarakat untuk dapat berpikir jernih dalam berbangsa dan bernegara, yang dimana pada saat sosialisasi wawasan kebangsaan ini berjalan dengan baik, mengajak untuk masyarakat dapat menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam hal ini juga menjelaskan bahwa kesbangpolda telah mampu mengajak sebagian besar masyarakat untuk dapat menjadi warga negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada pancasila.

Dalam hal ini hasil dari pembinaan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh kesbangpolda membawah hasil yang baik bagi kehidupan masyarakat yang ada, karena pihak kesbangpolda sendiri dalam melaksanakan sosialisasi ini sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat. Kesbangpolda juga memperlihatkan hasil yang baik dari sosialisasi wawasan kebangsaan walaupun ditengah pandemi covid-19, ditengah pandemi covid-19 juga walaupun tidak semua program sosialisasi wawasan kebangsaan tidak terlaksana namun makna dari wawasan kebangsaan ini tidak hilang dan tetap tertanamkan dengan baik oleh masyarakat yang ada, karena tujuan dari sosialisasi ini untuk bisa memberikan pada masyarakat untuk dapat menjaga kesatuan dan keutuhan

negara kita khususnya Provinsi Sulawesi Utara.

Hasil dari sosialisasi wawasan kebangsaan ini di harapkan dapat membawah masyarakat Sulawesi Utara untuk memahami tentang nilai-nilai pancasila dan juga cinta kepada tanah air, agar supaya kehidupan masyarakat yang ada tetap terjaga keutuhan dan kesadaran sebagai warga negara yang baik dan benar.

Hasil dari pembinaan organisasi kemasyarakatan juga bisa membawah masyarakat untuk dapat berpikir jernih dalam berbangsa dan bernegara, yang dimana pada saat sosialisasi wawasan kebangsaan ini berjalan dengan baik, mengajak untuk masyarakat dapat menanamkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam hal ini juga menjelaskan bahwa kesbangpolda telah mampu mengajak sebagian besar masyarakat untuk dapat menjadi warga negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung pada pancasila.

Dalam hal ini hasil dari pembinaan organisasi kemasyarakatan yang dilakukakan oleh kesbangpolda membawah hasil yang baik bagi kehidupan masyarakat yang ada, karena pihak kesbangpolda sendiri dalam melaksanakan sosialisasi ini sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat. Kesbangpolda juga memperlihatkan hasil yang baik dari sosialisasi wawasan kebangsaan walaupun ditengah pandemi covid-19, ditengah pandemi covid-19 juga walaupun tidak semua program sosialisasi wawasan kebangsaan tidak terlaksana namun makna dari wawasan kebangsaan ini tidak hilang dan tetap tertanamkan dengan baik oleh masyarakat yang ada, karena tujuan dari sosialisasi ini untuk bisa memberikan pada masyarakat untuk

dapat menjaga kesatuan dan keutuhan negara kita khususnya Provinsi Sulawesi Utara.

3. Kaitan Usaha dengan Pencapaian.

Kaitan usaha dengan pencapaian yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik sulawesi utara dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan dapat dilihat dari aktifnya organisasi kemasyarakatan dalam proses menjalankan tujuan dari masing-masing organisasi kemasyarakatan yang ada. Maka dalam hal ini dapat dilihat bahwa kesbangpol sendiri dalam melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan telah berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, dalam proses pelaksanaan pembinaan organisasi yang ada dilingkungan masyarakat khususnya di provinsi Sulawesi Utara.

Manfaat dari pembinaan organisasi kemasyarakatan tentunya untuk dapat membuka ruang berpikir masyarakat agar dapat menjaga kesatuan dan keutuhan negara khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bisa lihat bahwa pentingnya pembinaan organisasi kemasyarakatan yang ada. Maka dari itu pentingnya pembinaan organisasi wawasan kebangsaan yang manfaatnya besar dan sangat terasa pada kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Manfaat dari pembinaan organisasi kemasyarakatan juga terasa pada setiap elemen masyarakat yang ada, yang dimana mampu membawah masyarakat untuk dapat menerapkan nilai-nilai pancasila yang ada. Dalam hal ini manfaat dari sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh kesbangpolda ternyata membuka pola pikir masyarakat untuk dapat menjalankan dan memaknai

kehidupan masyarakat sebagai warga negara sebagai mestinya.

Manfaat sosialisasi wawasan kebangsaan juga dapat mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan berbangsa dan bernegara, berlandaskan nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Manfaat dari sosialisasi wawasan kebangsaan juga bisa dilihat dari terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, solid, damai, dan harmonis. Melihat akan hal itu, pihak kesbangpolda terus mendorong dan melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan ini, karena manfaat dari sosialisasi ini terasa pada setiap kehidupan masyarakat yang ada.

Manfaat sosialisasi wawasan kebangsaan juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bernegara yang baik. Dalam hal ini juga sosialisasi wawasan kebangsaan ini membawah masyarakat untuk bisa mengenal kembali nilai-nilai Pancasila yang hari ini hampir dilupakan oleh sebagian masyarakat yang ada, karena terpengaruhi oleh modernisasi dan budaya luar. Masyarakat yang ada juga merasakan manfaat dari sosialisasi wawasan kebangsaan ini, lewat materi-materi yang mengajarkan tentang cinta tanah air, revolusi mental, dan menjaga kesatuan dan keutuhan dalam bernegara.

Pihak kesbangpolda sendiri dalam proses pembinaan organisasi kemasyarakatan selalu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan juga generasi muda. Hal ini dikarenakan kesbangpolda dalam pelaksanaan sosialisasi membutuhkan bantuan dari semua elemen masyarakat yang ada, karena pembinaan organisasi

kemasyarakatan ini perlu adanya peran aktif dari masyarakat yang ada, agar supaya tujuan dari pembinaan organisasi kemasyarakatan ini dapat berjalan dengan baik, karena harapan dari kesbangpolda sendiri ini dapat menjadi acuan untuk masyarakat yang ada terlebih khusus pada organisasi kemasyarakatan yang ada. Dalam proses pembinaan organisasi kemasyarakatan, ternyata LSM selalu berperan aktif dan selalu ambil bagian dalam proses sosialisasi wawasan kebangsaan ini. Pihak kesbangpolda sendiri juga mengharapkan untuk setiap proses sosialisasi wawasan kebangsaan ini, untuk semua elemen masyarakat dapat berperan aktif dan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan yang ada.

Proses Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Utara dalam mensosialisasikan tentunya harus ada perencanaan dan persiapan yang baik dan matang, karena mengingat bahwa wawasan kebangsaan ini merupakan suatu cara pandang yang harus melekat di setiap kehidupan masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan ini juga pihak kesbangpol sendiri memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hal ini dengan tujuan agar penerapan wawasan kebangsaan ini bisa menjadi acuan dan pemikiran masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka sebagai warga negara yang baik dan benar.

Dalam hal ini juga proses pelaksanaan sosialisasi ini membutuhkan dorongan dan kerja sama dari masyarakat, karena walaupun dari pihak kesbangpol sendiri sudah melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan ini

dengan baik, namun dari masyarakat sendiri yang tidak menerapkan nilai-nilai dari wawasan kebangsaan ini, maka tujuan dari pelaksanaan wawasan kebangsaan ini tidak bisa terlaksana dan tidak bisa diterapkan pada kehidupan masyarakat yang ada.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara dalam mensosialisasikan wawasan kebangsaan ini juga membutuhkan anggaran untuk menunjang program ini, ketika wabah covid-19 melanda Provinsi Sulawesi Utara, maka dengan otomatis anggaran untuk pelaksanaan ini berkurang, dan tentunya ada beberapa program yang tidak dapat dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sulawesi Utara.

Penutup

Kesimpulan

Pihak kesbangpolda sendiri dalam proses pembinaan organisasi kemasyarakatan selalu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan juga generasi muda. Hal ini dikarenakan kesbangpolda dalam pelaksanaan sosialisasi membutuhkan bantuan dari semua elemen masyarakat yang ada, karena pembinaan organisasi kemasyarakatan ini perlu adanya peran aktif dari masyarakat yang ada, agar supaya tujuan dari pembinaan organisasi kemasyarakatan ini dapat berjalan dengan baik, karena harapan dari kesbangpolda sendiri ini dapat menjadi acuan untuk masyarakat yang ada terlebih khusus pada organisasi kemasyarakatan yang ada. Dalam proses pembinaan organisasi kemasyarakatan, ternyata LSM selalu berperan aktif dan selalu ambil bagian dalam proses sosialisasi wawasan kebangsaan ini. Pihak kesbangpolda sendiri juga mengharapkan untuk setiap proses sosialisasi wawasan

kebangsaan ini, untuk semua elemen masyarakat dapat berperan aktif dan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan yang ada.

Dalam hal ini hasil dari pembinaan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh kesbangpolda membawahi hasil yang baik bagi kehidupan masyarakat yang ada, karena pihak kesbangpolda sendiri dalam melaksanakan sosialisasi ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kesbangpolda juga memperlihatkan hasil yang baik dari sosialisasi wawasan kebangsaan walaupun ditengah pandemi covid-19, ditengah pandemi covid-19 juga walaupun tidak semua program sosialisasi wawasan kebangsaan tidak terlaksana namun makna dari wawasan kebangsaan ini tidak hilang dan tetap tertanam dengan baik oleh masyarakat yang ada, karena tujuan dari sosialisasi ini untuk bisa memberikan pada masyarakat untuk dapat menjaga kesatuan dan keutuhan negara kita khususnya Provinsi Sulawesi Utara.

Manfaat dari pembinaan organisasi kemasyarakatan tentunya untuk dapat membuka ruang berpikir masyarakat agar dapat menjaga kesatuan dan keutuhan negara khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bisa lihat bahwa pentingnya pembinaan organisasi kemasyarakatan yang ada. Maka dari itu pentingnya pembinaan organisasi wawasan kebangsaan yang manfaatnya besar dan sangat terasa pada kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Manfaat dari pembinaan organisasi kemasyarakatan juga terasa pada setiap elemen masyarakat yang ada, yang dimana mampu membawahi

masyarakat untuk dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada. Dalam hal ini manfaat dari sosialisasi wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh kesbangpolda ternyata membuka pola pikir masyarakat untuk dapat menjalankan dan memaknai kehidupan masyarakat sebagai warga negara sebagai mestinya

Saran

Hal ini dikarenakan kesbangpolda dalam pelaksanaan sosialisasi membutuhkan bantuan dari semua elemen masyarakat yang ada, karena pembinaan organisasi kemasyarakatan ini perlu adanya peran aktif dari masyarakat yang ada, agar supaya tujuan dari pembinaan organisasi kemasyarakatan ini dapat berjalan dengan baik, karena harapan dari kesbangpolda sendiri ini dapat menjadi acuan untuk masyarakat yang ada terlebih khusus pada organisasi kemasyarakatan yang ada. Dalam proses pembinaan organisasi kemasyarakatan, ternyata LSM selalu berperan aktif dan selalu ambil bagian dalam proses sosialisasi wawasan kebangsaan ini. Pihak kesbangpolda sendiri juga mengharapkan untuk setiap proses sosialisasi wawasan kebangsaan ini, untuk semua elemen masyarakat dapat berperan aktif dan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan yang ada.

Disarankan juga untuk Badan kesatuan bangsa dan politik Sulawesi Utara dalam proses pembinaan organisasi kemasyarakatan yang ada, harus lebih memperhatikan hasil yang di capai oleh kesbangpolda dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan yang ada, artinya tiap bulan yang ada, harus dilakukan evaluasi terhadap program pembinaan organisasi kemasyarakatan apakah bermanfaat atau tidak.

Disarankan juga untuk Badan kesatuan bangsa dan politik Sulawesi Utara harus lebih lagi meningkatkan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang ada, mengingat belum semua organisasi kemasyarakatan yang dapat dijangkau oleh pihak kesbangpolda sendiri.

Dalam proses pembinaan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik Sulawesi Utara diharapkan mampu memberikan arahan dan juga tujuan yang baik kepada organisasi kemasyarakatan yang ada, agar supaya tujuan dari tiap-tiap organisasi kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Agus Dwiyanto dkk.2012. Reformasi Birokrasi Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.Yogyakarta.
- Baban Sobandi dkk, (2016). Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah. Bandung.
- Bastian, Indra. 2011. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Budiarjo, Miriam. 2018. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka. Jakarta
- Hasibuan, Malayu. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Handayaniingrat. Soewarno. 1985. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta : CV Haji Masagung
- Hardjito, Dydiet. 2007. Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian Edisi: I. Jakarta: RajaGrafindo
- Mangkunegara,Anwar Prabu. (2017). Manajemen Sumber Daya

- Manusia Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, j, Lexy. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : Rineka Cipta.
- Ruky, Achmad, 2011. Sistem Manajemen Kinerja. PT Gramedia, Jakarta.
- Sinungan, Muchdarsyah, 2011. Produktivitas. Apadan Bagaimana. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo. 2017. Manajemen Kinerja. Edisi Kedua. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widodo, Joko.2016. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang. Banyu Media Publishing.
- Wursanto, Ignasius. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. Edisidua. Yogyakarta: Andi
- Surbakti Ramlan . 2007. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, 2008.

Sumber lainnya :

- Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Gatot Eddy Pramono 2015:5 *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol, 1